

Pemodelan Realisasi Keuangan Menggunakan Maqasid Syariah Pendekatan: Kasus Kabupaten Bangka Tengah

¹ Riska Wijayanti

¹ IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

¹ rskwijayanti@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Monitoring,
Evaluation,
Maqashid Shariah.

Kata Kunci:

Monitoring,
Evaluasi,
Maqashid Syariah.

ABSTRACT

The study discusses how the financial realization of the monitoring and evaluation of APBD data in Bangka Central District is already in line with the sharia-based approach or is not yet close. This research will also provide a new model for the ongoing regional development program. in accordance with the five-priority sharia maqasid. This research uses qualitative methods using analytical networking processes, or ANP, with case studies in Central Bangka District. This method is a way of obtaining decisions and using calculations to obtain ratio scales. Data from this study is obtained from interioews with related sections, direct observations, and related data. From this research, it will be known that the implementation of the Monitoring and Evaluation of Data District of Bangka Tengah has not approached the maqasid shariah, also this research. It will provide a new data monitoring and evaluation model with five sharia concepts.

ABSTRAK

Kajian ini membahas bagaimana realisasi keuangan pada data monitoring dan evaluasi APBD Kabupaten Bangka Tengah sudah sesuai dengan pendekatan maqasid syariah atau belum mendekati, juga penelitian ini akan memberikan model baru untuk program pembangunan daerah yang sedang berjalan. sesuai dengan lima maqasid syariah prioritas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan proses jaringan analitik atau ANP dengan studi kasus di Kabupaten Bangka Tengah. Metode ini merupakan cara memperoleh keputusan dan menggunakan perhitungan untuk mendapatkan skala rasio. Data dari penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan bagian terkait, observasi langsung, dan data terkait. Dari penelitian ini akan diketahui hasil bahwa Realisasi Monitoring dan Evaluasi Data Kabupaten Bangka Tengah belum mendekati maqasid syariah, juga penelitian ini. Akan memberikan model pemantauan dan evaluasi data baru dengan lima konsep maqasid syariah



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

Corresponding Author:

Riska Wijayanti
rskwijayanti@gmail.com

INTRODUCTION

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, Pemerintah Kabupaten atau Kota diberikan keleluasaan untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing. Untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah, Pemerintah telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memperhatikan APBN dan APBD Provinsi.

Demi mewujudkan pemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efektif, bersih, dan bertanggung jawab, serta lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam

mencapai tujuan instansi, Pemerintah telah Mangalorean berbagai pedoman dan proturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah; baik provinsi maupun kabupaten/kota; melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pembangunan di daerah yaitu dengan diterbitkannya PP No. 39 Tahun 2006 dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006, tentang "Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi. Pelaksanaan Rencana Pembangunan" yang kemudian disempurnakan dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010.

Setiap tahun Program Pembangunan selalu dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bagi daerah. Namun untuk melihat tingkat keberhasilan dan pencapaian tujuan program, perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (MONEV) terhadap manfaat dari program pembangunan yang telah dilakukan. Pembangunan adalah sesuatu yang positif, diinginkan, dan terkait dengan perubahan atau perbaikan (Bellu 2011). Pembangunan diartikan sebagai upaya untuk melakukan perubahan dalam kehidupan masyarakat yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berbicara tentang tujuan akhir kesejahteraan, akan lebih baik untuk mensejahterakan dunia dan akhirat (Fallah). Kesejahteraan dalam Islam dapat diukur dengan salah satu indikatornya, yaitu maqasid asy-syar'iyah. Menurut Maftukhatussolihah (2015:57), maqy'shid syariah dalam perspektif ekonomi Islam dipahami dengan pembangunan kesejahteraan manusia (fallah) baik di dunia maupun di akhirat. Penentuan anggaran pemerintah atau negara dalam perspektif maqy'sid syari'ah berarti menyesuaikan kebutuhan dasar rakyat yang harus dipenuhi dan dilindungi, antara lain Perlindungan Agama (hifzundin), Perlindungan Jiwa (hifzun-nafs), Perlindungan Akal (hifzun-'aql), Perlindungan Keturunan (hifzun-nasl) dan Perlindungan Harta (hifzun-maal).

Rahmawati (2012) juga menyimpulkan bahwa pemikir Islam seperti Al Mawardi, Abu Yusuf, Yahya bin Adam, Abu Ubaid menyebutkan bahwa konsep dasar alokasi pendapatan negara adalah masy'alah dan Al-Ghazali mengartikan masalah sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan terhadap lima maqashid syariah.

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah program pembangunan yang telah dilakukan telah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan melihat data MONEV sebagai acuan tingkat keberhasilan dan capaian program yang telah dilaksanakan.

Dalam penelitian ini digunakan data MONEV di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2017-2020 dengan pendekatan maqy'sid syariah sebagai tolok ukur kesejahteraan masyarakat.

Identifikasi masalah yang penulis temukan adalah, penulis tertarik dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang berbunyi "Terwujudnya Negeri Selawang Segantang Yang Amanah, Bersih, Berwibawa, dan Sejahtera berlandaskan Ekonomi Kerakyatan". Negeri Selawang Segantang yang sejahtera berarti terwujudnya keadaan masyarakat Bangka Tengah yang memiliki mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang memadai yaitu minimal yang memenuhi kebutuhan hidup primer dan sekunder, termasuk untuk pendidikan generasi selanjutnya, serta memiliki hubungan yang harmonis dalam kehidupan masyarakat. keluarga dan di masyarakat. Pemerintahan yang amanah, bersih dan berwibawa adalah pemerintahan yang memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya dengan tertib dan damai. Visi dan misi yang menjadi tujuan suatu daerah membuat suatu daerah terus melakukan perubahan terhadap daerahnya, terus melakukan pembaharuan dalam pembangunan daerahnya.

Karena tertarik dengan visi misi ini yang menyebutkan kata sejahtera, seketika penulis langsung teringat kata "Fallah" atau dikenal dengan istilah sejahtera dunia dan akhirat. Setiap manusia selalu ingin merasa bahagia dan sejahtera dalam kelangsungan hidupnya, tetapi juga harus bertanggung jawab atas apa yang diambil demi kebahagiaan dunia. Dari judul yang dipilih penulis "Data Monitoring dan Evaluasi Realisasi Keuangan dengan Pendekatan Maqasid Syariah: Studi Kasus Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017-2020". Penulis berpendapat bahwa dengan melihat hasil program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, akan diketahui apakah semua tujuan program pembangunan adalah untuk mensejahterakan rakyat. Maka akan lebih sejahtera jika program pembangunan dilakukan dengan maqasid asy-syar'iyah.

Hasil dari program pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah akan dilihat dari data Monitoring dan Evaluasi, disini akan dilihat apakah program tersebut telah mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Jika program yang dilaksanakan kurang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, maka akan dilakukan pendekatan maqasid asy syar'yyah sebagai bentuk model baru dalam pelaksanaan program pembangunan pemerintah daerah.

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, nampaknya pemerintah daerah menginginkan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah mendapatkan kesejahteraan. Namun, masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana tingkat pendekatan maqasid syariah pada Realisasi Keuangan Monitoring dan Evaluasi Data APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017-2020?
2. Bagaimana model pengelolaan dana APBD yang relevan dengan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan maqasid asy-syar'yyah?

Penelitian ini dibatasi pada data variabel monitoring dan evaluasi (MONEV) yang memuat data APBD dalam program pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017-2020 dengan melihat seberapa besar anggaran pemerintah untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kajian ini dianalisis dengan melihat realisasi keuangan masing-masing sektor atau perangkat daerah dengan membandingkan total pengeluaran yang tercatat dalam realisasi keuangan pada tahun 2011 monitoring dan evaluasi data sehingga dapat dilihat persentase anggaran masing-masing bidang/fungsi dan akan terlihat mana yang menjadi prioritas oleh pemerintah.

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

Manfaat pertama yang dapat diambil dari penelitian ini bagi penulis sendiri adalah penulis mengetahui tentang data realisasi belanja daerah sehingga mengetahui penyelenggaraan perangkat daerah yang diutamakan. dalam melaksanakan program pembangunan pemerintah kabupaten Bangka Tengah dengan pendekatan maqasid asy- syar'yyah sebagai tolak ukur untuk mensejahterakan masyarakat.

Kedua, manfaat bagi pihak umum penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan sebagai masukan, informasi, dan literatur bagi pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebagai tolak ukur data Monitoring dan Evaluasi dengan model realisasi pendekatan maqasid syariah.

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pendekatan maqasid syariah dalam Realisasi Monitoring dan Evaluasi Data APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017-2020.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan model pengelolaan dana APBD yang relevan dengan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan maqasid syariah.

Pada bagian satu berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian selanjutnya akan membahas tinjauan pustaka menjelaskan, pengertian teori, dan penelitian terdahulu yang menjadi bahan acuan dalam penelitian ini. Kemudian, penulis akan menguraikan metodologi yang digunakan dalam penelitian dan proses pengumpulan data. Hasil dan rekomendasi kepada pihak terkait akan ditegaskan pada bagian selanjutnya. Bagian terakhir akan menyimpulkan penelitian.

METHODS

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, Pemerintah Kabupaten atau Kota diberikan keleluasaan untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing. Untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah, Pemerintah telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memperhatikan APBN dan APBD Provinsi.

Demi mewujudkan pemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efektif, bersih, dan bertanggung jawab, serta lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan instansi, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai pedoman dan peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah; baik provinsi maupun kabupaten/kota;

melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pembangunan di daerah yaitu dengan diterbitkannya PP No. 39 Tahun 2006 dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006, tentang “Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan” yang kemudian disempurnakan dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010.

Setiap tahun Program Pembangunan selalu dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bagi daerah. Namun untuk melihat tingkat keberhasilan dan pencapaian tujuan program, perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (MONEV) terhadap manfaat dari program pembangunan yang telah dilakukan.

Pembangunan adalah sesuatu yang positif, diinginkan, dan terkait dengan perubahan atau perbaikan (Bellu 2011). Pembangunan diartikan sebagai upaya untuk melakukan perubahan dalam kehidupan masyarakat yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbicara tentang tujuan akhir kesejahteraan, akan lebih baik untuk mensejahterakan dunia dan akhirat (Fallah).

Kesejahteraan dalam Islam dapat diukur dengan salah satu indikatornya, yaitu maqasid asy-syarīyah. Menurut Maftukhatussolihah (2015:57), maqyshid syariah dalam perspektif ekonomi Islam dipahami dengan pembangunan kesejahteraan manusia (fallah) baik di dunia maupun di akhirat.

Penentuan anggaran pemerintah atau negara dalam perspektif maqy’sid syari’ah berarti menyesuaikan kebutuhan dasar rakyat yang harus dipenuhi dan dilindungi, antara lain Perlindungan Agama (hifzun-din), Perlindungan Jiwa (hifzun-nafs), Perlindungan Akal (hifzun-'aql), Perlindungan Keturunan (hifzun- nasl) dan Perlindungan Harta (hifzun-maal).

Rahmawati (2012) juga menyimpulkan bahwa pemikir Islam seperti Al Mawardi, Abu Yusuf, Yahya bin Adam, Abu Ubaid menyebutkan bahwa konsep dasar alokasi pendapatan negara adalah masylāyah dan Al-Ghazali mengartikan masalah sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan terhadap lima maqashid syariah.

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah program pembangunan yang telah dilakukan telah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan melihat data MONEV sebagai acuan tingkat keberhasilan dan capaian program yang telah dilaksanakan. Dalam penelitian ini digunakan data MONEV di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2017-2020 dengan pendekatan maqy’sid syariah sebagai tolok ukur kesejahteraan masyarakat.

Identifikasi masalah yang penulis temukan adalah, penulis tertarik dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang berbunyi “Terwujudnya Negeri Selawang Segantang Yang Amanah, Bersih, Berwibawa, dan Sejahtera berlandaskan Ekonomi Kerakyatan”. Negeri Selawang Segantang yang sejahtera berarti terwujudnya keadaan masyarakat Bangka Tengah yang memiliki mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang memadai yaitu niminal yang memenuhi kebutuhan hidup primer dan sekunder, termasuk untuk pendidikan generasi selanjutnya, serta memiliki hubungan yang harmonis dalam kehidupan masyarakat. keluarga dan di masyarakat. Pemerintahan yang amanah, bersih dan berwibawa adalah pemerintahan yang memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya dengan tertib dan damai. Visi dan misi yang menjadi tujuan suatu daerah membuat suatu daerah terus melakukan perubahan terhadap daerahnya, terus melakukan pembaharuan dalam pembangunan daerahnya.

Karena tertarik dengan visi misi ini yang menyebutkan kata sejahtera, seketika penulis langsung teringat kata “Fallah” atau dikenal dengan istilah sejahtera dunia dan akhirat. Setiap manusia selalu ingin merasa bahagia dan sejahtera dalam kelangsungan hidupnya, tetapi juga harus bertanggung jawab atas apa yang diambil demi kebahagiaan dunia. Dari judul yang dipilih penulis “Data Monitoring dan Evaluasi Realisasi Keuangan dengan Pendekatan Maqasid Syariah: Studi Kasus Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017-2020”. Penulis berpendapat bahwa dengan melihat hasil program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, akan diketahui apakah semua tujuan program pembangunan adalah untuk mensejahterakan rakyat. Maka akan lebih sejahtera jika program pembangunan dilakukan dengan maqasid asy-syarīyah.

Hasil dari program pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah akan dilihat dari data Monitoring dan Evaluasi, disini akan dilihat apakah program tersebut telah mengutamakan

kesejahteraan masyarakat. Jika program yang dilaksanakan kurang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, maka akan dilakukan pendekatan maqasid asy syar'yyah sebagai bentuk model baru dalam pelaksanaan program pembangunan pemerintah daerah. Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, nampaknya pemerintah daerah menginginkan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah mendapatkan kesejahteraan.

Namun, masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana tingkat pendekatan maqasid syariah pada Realisasi Keuangan Monitoring dan Evaluasi Data APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017-2020?
2. Bagaimana model pengelolaan dana APBD yang relevan dengan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan maqasid asy-syar'yyah?

Penelitian ini dibatasi pada data variabel monitoring dan evaluasi (MONEV) yang memuat data APBD dalam program pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017-2020 dengan melihat seberapa besar anggaran pemerintah untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kajian ini dianalisis dengan melihat realisasi keuangan masing-masing sektor atau perangkat daerah dengan membandingkan total pengeluaran yang tercatat dalam realisasi keuangan pada tahun 2011 monitoring dan evaluasi data sehingga dapat dilihat persentase anggaran masing-masing bidang/fungsi dan akan terlihat mana yang menjadi prioritas oleh pemerintah.

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

Manfaat pertama yang dapat diambil dari penelitian ini bagi penulis sendiri adalah penulis mengetahui tentang data realisasi belanja daerah sehingga mengetahui penyelenggaraan perangkat daerah yang diutamakan. dalam melaksanakan program pembangunan pemerintah kabupaten Bangka Tengah dengan pendekatan maqasid asy- syar'yyah sebagai tolak ukur untuk mensejahterakan masyarakat.

Kedua, manfaat bagi pihak umum penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan sebagai masukan, informasi, dan literatur bagi pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebagai tolak ukur data Monitoring dan Evaluasi dengan model realisasi pendekatan maqasid syariah.

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pendekatan maqasid syariah dalam Realisasi Monitoring dan Evaluasi Data APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017-2020.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan model pengelolaan dana APBD yang relevan dengan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan maqasid syariah.

Pada bagian satu berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian selanjutnya akan membahas tinjauan pustaka menjelaskan, pengertian teori, dan penelitian terdahulu yang menjadi bahan acuan dalam penelitian ini. Kemudian, penulis akan menguraikan metodologi yang digunakan dalam penelitian dan proses pengumpulan data. Hasil dan rekomendasi kepada pihak terkait akan ditegaskan pada bagian selanjutnya. Bagian terakhir akan menyimpulkan penelitian

FINDINGS AND DISCUSSION

1. Pandangan Umum

Bangka Tengah terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka Tengah terbentuk pada tanggal 25 Februari 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003. Kabupaten Bangka Tengah terletak di Pulau Bangka. Secara administratif wilayah Kabupaten Bangka Tengah berbatasan langsung dengan daratan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dengan wilayah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, dan Bangka Selatan. Saat ini Kabupaten Bangka Tengah memiliki enam kecamatan yaitu Koba, Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalan Baru, Sungai Selan, Simpang Katis, dan Namang. Terbentuknya Kabupaten Bangka Tengah bukan hanya karena kebutuhan pembangunan provinsi tetapi juga karena keinginan masyarakat di dalamnya, serta upaya untuk mempersiapkan pembangunan daerah dan terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Penelitian ini berisi tentang kinerja pemerintah dan pembangunan yang

dilakukan secara eksploratif dengan menjelaskan tentang realisasi keuangan program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan dalam penelitian ini realisasi tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja yang disesuaikan dengan paradigma maqasid asy-syarÿyah. , dengan menganalisis interkoneksi hirarki maqasid syariah atau interkoneksi tiap item dalam maqasid asy-syarÿyah.

Pengelompokan sektor fungsional atau perangkat daerah menurut maqasid syariah setelah diambil dari berbagai sumber ditemukan pengelompokan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Pengelompokan Urusan dalam APBD

Maqashid Asy Syariah	Urusan dalam APBD
Hifdz Al-Din	Keamanan, Disiplin dan Ketentraman Kesejahteraan Rakyat
Hifdz Al-Nafs	Kesehatan Perumahan dan Sarana Umum Ketahanan Pangan Sosial Pelayanan Publik
Hifdz Al-'Aql	Perpustakaan Pendidikan Budaya Pemuda dan Olahraga Pariwisata
Hifdz Al-Nasl	Kehutanan Lingkungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Hifdz Al-Maal	Koperasi dan UKM Ekonomi Ketenagakerjaan Investasi Pertanian Energi dan Sumber Daya Manusia Perdagangan Kelautan dan Perikanan Industri

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber (2022)

Maqasid syariah dalam kajian ini yang pertama ada hifdz al-din (Menjaga Agama) ada perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP) masuk dalam perlindungan agama karena memiliki fungsi disiplin, ketentraman umat. Kedisiplinan dan ketentraman masuk dalam kategori perlindungan agama (ÿifdz dÿn) menurut Afra dalam Maftukhatussolihah (2015) karena menurut rincian hak dasar dalam pemeliharaan agama terdapat titik lembaga keamanan, dinas keamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban. pengamanan pelaksanaan dakwah dan pelayanan aparatur yang masuk dalam fungsi sektoral terdapat perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Kedua dalam pemeliharaan jiwa (ÿifdz-nafs) menurut Afra dalam Maftukhatussolihah (2015), sembilan hal yang harus dipenuhi: makanan, peralatan untuk menjaga mulut, gigi, dan lain- lain, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, transportasi, dan komunikasi. (pelayanan publik), keselamatan individu dan hak milik, pertahanan masyarakat sipil, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial.

Ketiga pemeliharaan akal (ÿifdz-'aql) yang berkaitan dengan pendidikan. Tentunya dengan pendidikan yang berkualitas akan melahirkan generasi yang cerdas. Informasi, budaya, dan lembaga penelitian juga masuk akal menurut Maftukhatussolihah (2015). Kemudian pemuda dan olah raga yang termasuk dalam pemeliharaan akal diberi pepatah populer " Akal sehat terdapat dalam jiwa yang sehat". Perpustakaan juga termasuk dalam kategori pelestarian sumber daya karena terdapat fungsi pendidikan. Yang keempat adalah perlindungan keturunan (ÿifdz-nasl) dalam hal ini lingkungan hidup yang merupakan program pemerintah dalam rangka perlindungan, pelestarian. , penguasaan sumber daya alam, dan sebagainya.

Dalam Islam, perlindungan keturunan adalah bagaimana SDA dikelola tidak sampai habis tetapi juga terbatas pada persiapan generasi yang akan datang. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masuk dalam kategori perlindungan turunan. Terakhir, kelima adalah perlindungan harta (ÿifdz-mÿl) yang dalam hal ini diterjemahkan menjadi fungsi ekonomi dalam anggaran. Untuk Bangka Pusat, APBD Kabupaten dapat dirinci dengan urusan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi daerah seperti koperasi, penanaman modal, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, dan perindustrian. Ketenagakerjaan termasuk dalam kategori perlindungan harta benda karena berkaitan dengan tersedianya lapangan pekerjaan umum untuk dapat meningkatkan perekonomian individu.

Realisasi Anggaran Maqāsid Syari'ah Tahun 2017-2020 mengacu pada teori yang telah dijelaskan sebelumnya, selain itu dalam menganalisis level maqāsid syariah dengan perangkat pastoral sektoral atau wilayah dirumuskan dengan tabel 2 berikut:

Tabel 2
Pembelanaan Anggaran Maqāsid Syari'ah di Daerah Kabupaten Bangka Tengah

Maqashid Asy Syariah	Organisasi Perangkat Daerah
Keriuhan	BKBP (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja)
Nafs	Dinas Kesehatan DPU TRP (Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Perumahan) DIPERKIMHUB DINDUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DINSOSPEMDES BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Inspektorat Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah DPRD Kecamatan Koba Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Sungai Selan Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Namang Kecamatan Lubuk Besar
'Aql	Dinas Pendidikan BAPELITBANDA (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah) DISKOMINFOSTA (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan DINBUDPARPORA (Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga)
Nasl	Dinas Lingkungan Hidup DPPKBPPPA (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
Maal	BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) PPKAD (Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) BPPRD (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah) BKPSDMD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah) DPMPTK (Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja) Dinas Pangan Dinas Pertanian Dinas Perikanan DIPERINDAGKOP-UKM (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah)

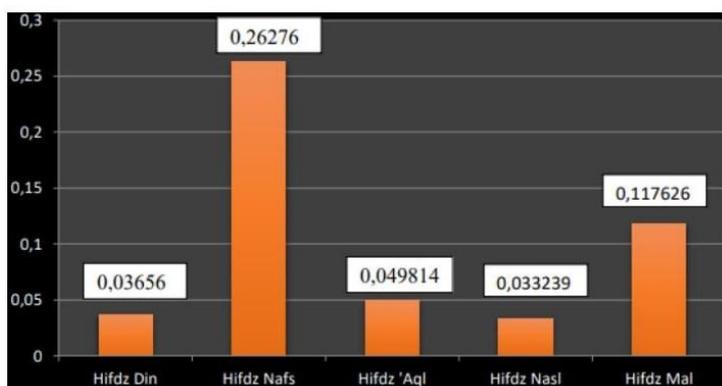
Sumber: Data olahan disesuaikan dengan sumber yang diperoleh dari berbagai sumber (2022)

Analisis sektoral dengan perhitungan masing-masing usaha yang masuk dalam kategori belanja maqāsid syari'ah pada Realisasi Keuangan Pusat Kabupaten Bangka tahun anggaran 2017 - 2020 dirinci dalam tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Realisasi Maqashid Syari'ah Finance di Kabupaten Centrak Bangka APBD Tahun Anggaran 2017-2020

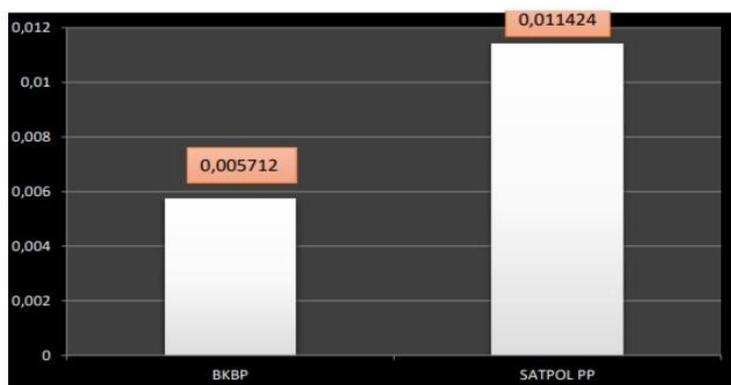
Maqasid Asy Syariah Tahun	Keriuhan	Nafs	'Aql	Nasl	Maal
2017	146.741.317.809,50	1.298.691.616.180,22 1.614.472.359.848,79	1.332.083.428.072,00 1.331.420.329.690,00	80.860.453.345,00	997.797.806.393,00
2018	60.965.042.567,33	1.991.759.885.495,11	1.489.387.348.350,60	86.864.864.683,00	2.833.334.881.008,17
2019	88.788.877.004,50	2.089.707.009.518,21	1.519.363.813.648,00	103.732.740.971,00	1.460.498.346.337,96
2020	391.220.085.830,33	6.994.630.871.042,3 3	5.672.254.919.760,6 0	89.241.660.696,00	1.517.855.147.884,00
Total Anggaran				360.699.719.695,00	6.809.486.181.623,13

tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebagai tolak ukur perbandingan prioritas sehingga diketahui hasil dari prioritas masing-masing cluster, baik kriteria, maupun subkriteria



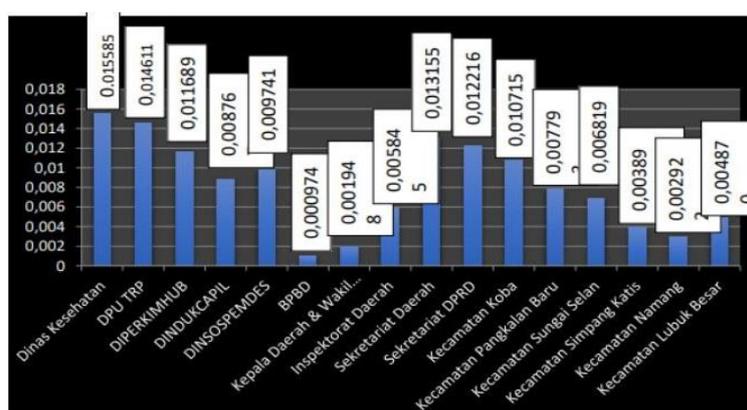
Gambar 2 Prioritas Maqasid Syariah

Hasil Prioritas yang ditunjukkan oleh Kluster Kriteria dimana pendekatan maqasid syariah yang diprioritaskan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 adalah hifdz al-nafs, kedua hifdz al-maal, ketiga hifdz al-'aql, keempat Hifdz Al-Din, dan pada prioritas terakhir adalah hifdz al-nasl.



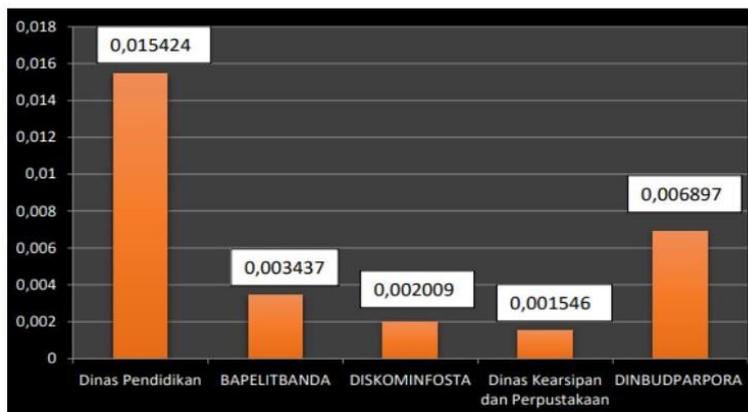
Gambar 3 SubKriteria Hifdz Al-Din Prioritas

Hasil Prioritas yang ditampilkan oleh Sub Kriteria Hifdz Al-Din menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah lebih mengutamakan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dibandingkan dengan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP).



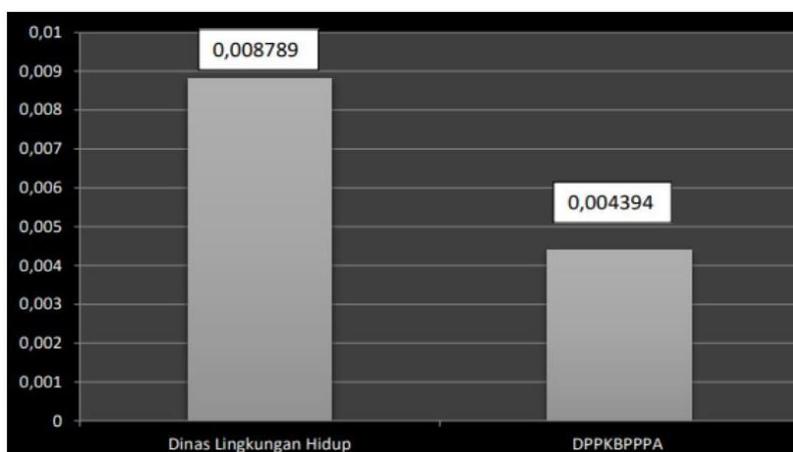
Gambar 4 Hifdz Al-Nafs Sub Kriteria Prioritas

Hasil prioritas subkriteria hifzd nafs menunjukkan Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi prioritas di Kabupaten Bangka Tengah adalah Dinas Kesehatan, urutan kedua Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Perumahan (DPUTRP), urutan ketiga Sekretariat Daerah, urutan keempat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kelima Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (DIPERKIMHUB), Enam Kecamatan Koba, tujuh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINSOSPEMDES), kedelapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL), sembilan Kecamatan Pangkalan Baru, ke-10 Kecamatan Sungai Selan, ke-11 Inspektorat Daerah, ke-12 Kecamatan Lubuk Besar, ke-13 Kecamatan Simpang Katis, ke-14 Kecamatan Namang, ke-15 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KDH &WKDH), dan prioritas terakhir adalah Kepala Daerah perangkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).



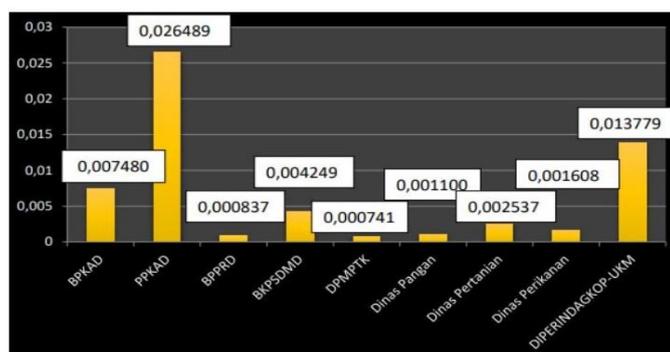
Gambar 5 Hifdz Al-'Aql Sub Kriteria Prioritas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sub kriteria hifdz al-'aql Dinas Pendidikan menempati urutan prioritas tertinggi, kedua adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (DINBUDPARPORA), ketiga Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA), keempat Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DISKOMINFOSTA), dan pada prioritas terakhir adalah perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.



Gambar 6 Prioritas Sub Kriteria Hifdz Al-Nasl

Hasil prioritas Sub Kriteria hifdz al-nasl menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup lebih diutamakan daripada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA).



Gambar 7 Prioritas Sub Kriteria Hifdz Al-Maal

Pada subkriteria hifdz al-maal terlihat hasil organisasi perangkat daerah yang diprioritaskan adalah Pejabat Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD), kedua Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (DIPERINDAGKOP-UKM), ketiga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), keempat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPKSDMD), lima Dinas Pertanian, enam Dinas Perikanan, tujuh Dinas Pangan, delapan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), dan terakhir prioritas Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPPTK).

3. Diskusi

Dari total anggaran realisasi keuangan tahun 2017-2020 terlihat bahwa realisasi keuangan pada data monitoring dan evaluasi Kabupaten Bangka Tengah tidak mendekati maqasid asy-syarÿyah, karena menurut urutan maqasid syariah urutan pertama adalah hifdz al-din, hifdz al-nafs kedua, hifdz al-'aql ketiga, hifdz al-nasl keempat dan terakhir adalah hifdz al-maal, sedangkan dari total anggaran realisasi keuangan Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan angka hifdz al-nafs menjadi yang teratas. prioritas utama, sedangkan hifdz al- din yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam realisasi keuangan berada pada urutan keempat, sesuai tabel 3.

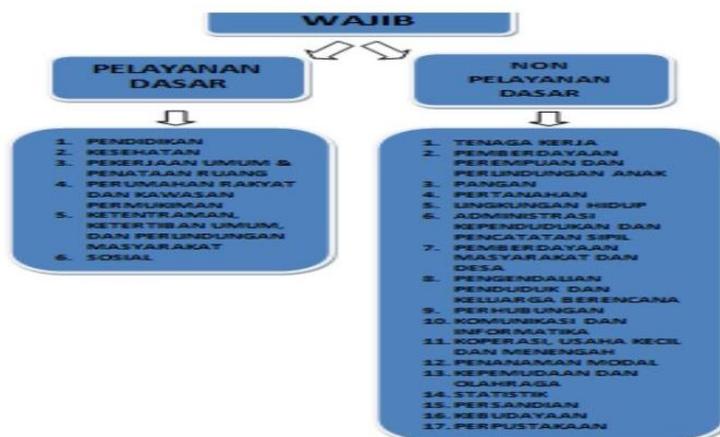
Menurut wawancara dengan Kepala Seksi Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Bangka Tengah Bapak Feri Prihatin, ST mengatakan bahwa "Keuangan tidak dapat direalisasikan secara berurutan sesuai dengan maqasid asy-syarÿyah karena UU Pembagian Urusan Pemerintahan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berisikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 penggolongan urusan pemerintahan yang terdiri dari 3 urusan yaitu urusan pemerintahan mutlak, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan mutlak adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang terbagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah provinsi dan kabupaten/kota Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai pimpinan pemerintah



Gambar 8. Tujuh Pembagian Urusan Pemerintahan

1. Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut pembagian urusan wajib.



Gambar 9. Pembagian Urusan Wajib

Jika dilihat secara keseluruhan tanpa melihat pengelompokan maqasid syariah 5 perangkat daerah yang memiliki ranking teratas memang beberapa urusan pemerintahan wajib yaitu pada ranking satu ada Dinas Pendidikan, kedua PPKAD, ketiga Dinas Kesehatan, keempat DIPERINDAGKOP -UKM dan terakhir DPU TRP. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengatakan sudah ada porsi masing-masing Dinas terkait yang menjadi urusan wajib pemerintah dan tidak bisa diganggu gugat persentase anggarannya.

Menurut Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ahmad Syarifullah Nizam, SE, M.AP mengatakan bahwa “Tidak dengan tatanan maqashid syariah bukan berarti tidak mementingkan kesejahteraan rakyat, perangkat daerah yang ditutamakan tentunya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, Dinas Pendidikan anggaran tertinggi artinya kalau tanpa pendidikan bagaimana bisa belajar ilmu agama, dan juga Dinas Kesehatan bagaimana kita akan beribadah dengan tenang jika badan tidak sehat, semua anggaran sudah dihabiskan adalah demi kesejahteraan rakyat dan untuk kepentingan rakyat”.

4. Model baru prioritas realisasi keuangan sesuai Maqasid Asy-Syar’iah

Pada pembahasan kedua ini, penulis membuat model dengan maqasid asy syar’iah dan mempertimbangkan UU No. 23 Tahun 2004.

Tabel
4 Model Sesuai Maqasid Asy-Syari'ah dan UU No.23 Tahun 2004

Maqashid Asy Syariah	Aparatur Organisasi Daerah
Keriuhan	BKBP Satpol P
Nafs	Dinas Kesehatan DPU TRP DIPERKIMHUB BPBD DINSOS PEMDES DINDUK CAPIL KDH & WKDH INSPEKTORAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD KEC. SUNGAI SELAN KEC. KOBA KEC. PANGKALAN BARU KEC. LUBUK BESAR KEC. SIMPANG KATIS KEC.NAMANG Dinas Pendidikan

'Aql	DISKOMINFOSTA BAPELITBANGDA DINBUDPARPORA DINAS KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN
Nasl	Dinas Lingkungan Hidup DPPKBPPPA
Mal	BKPSDMD Dinas Pangan Dinas Pertanian DIPERINDAGKOP-UKM DPMPTK PPKAD BPKAD BPPD Dinas Perikanan

5. Model Baru

Hifdz al-din, untuk hifdz al-din sendiri dalam pembagian tugas di lingkungan perangkat daerah hanya ada dua perangkat daerah yang masuk dalam kategori hifdz al- din yaitu BKBP dan SATPOL PP, BKBP harus diutamakan karena Nasional Badan Persatuan dan Politik mempunyai tugas melaksanakan fungsi mendukung urusan pemerintahan di bidang persatuan dan politik bangsa. Salah satu kesatuan bangsa adalah meskipun berbeda-beda tetap satu dalam hal agama, yang berarti perlindungan dalam agama.

Hifdz al-nafs, untuk hifdz al-nafs terdapat 16 perangkat daerah yang masuk dalam kategori hifdz al-nafs baik dari segi fungsi maupun pelaksanaan program, Sesuai UU 23 Tahun 2014 urusan pemerintahan wajib bagian pelayanan dasar yang pertama adalah Dinas Kesehatan, kemudian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman pada bagian sosial ada urutan BPBD dulu karena dinas ini bergerak di bidang sosial dalam penanggulangan bencana daerah, kemudian ada dinas sosial pemerintah desa. DINDUK CAPIL sudah masuk ke dalam kategori pelayanan non pokok, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD termasuk ke dalam kategori wajib yaitu peran kepentingan nasional. Untuk 6 kecamatan penulis susun urutannya berdasarkan jumlah RT artinya banyak orang.

Hifdz al-'aql, untuk hifdz al-'aql ada 5 perangkat daerah yang masuk dalam hifdz al-'aql Dinas Pendidikan masuk ke dalam hifdz al-'aql walaupun sebenarnya Pemerintah tetap harus mengikuti UU No.23 Tahun 2014 itu Dinas Pendidikan sudah memiliki persentase tersendiri karena Dinas Pendidikan masuk dalam kategori urusan wajib pemerintah daerah. DISKOMINFOSTA menempati urutan kedua karena masuk ke urusan pemerintahan wajib bagian pelayanan non dasar dan DISKOMINFOSTA menempati urutan teratas dibandingkan perangkat daerah lainnya dalam hifdz al-'aql. BAPELITBANGDA Menurut penulis sangat penting karena badan penelitian dan pengembangan daerah menjadi pusat ilmu untuk penelitian. DINBUDPARPORA dan Dinas Kearsipan masuk ke dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan nondasar, tetapi DINBUDPARPORA Memiliki urutan yang lebih tinggi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Hifdz Al-Nasl, untuk hifdz al-nasl ada dua perangkat daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan DPPKBPPPA masuk ke dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan non dasar, namun Dinas Lingkungan Hidup memiliki urutan yang lebih tinggi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hifdz Al-Maal, untuk hifdz al-maal ada 9 perangkat daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, dan Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja masuk ke dalam urusan pelayanan dasar wajib pemerintah daerah. PPKAD, BPKAD, dan BPPRD masuk ke dalam urusan pemerintahan peran kepentingan nasional, dan Dinas Perikanan masuk dalam kategori Urusan Pemerintahan Pilihan tidak wajib.

Model baru tersebut dipilih dan dirancang oleh penulis dengan mengikuti perangkat daerah yang masuk dalam kategori masing-masing maqasid asy syar'yyah, kemudian penulis juga merancang dan merekomendasikan model baru yang mengikuti model tersebut. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 yang berarti Pemerintah Bangka Pusat dapat mempertimbangkan model baru ini tanpa takut melanggar undang-undang yang telah ditetapkan, kecuali Dinas Pendidikan dan Kesehatan yang sudah memiliki porsi persentase untuk anggarannya tanpa diganggu gugat, apalagi Dinas Kesehatan membutuhkan anggaran yang sangat besar mengingat dengan adanya virus Covid-19 ini tentunya

setiap daerah ingin menyembuhkan orang yang sudah tertular, dan melindungi orang yang belum tertular.

Maqashid syariah	(Kisaran 1-5) (Q1) Bagaimana Penting	Pangkat (Q2)	Definisi
Hifdz Din	2	4	Realisasi keuangan untuk kemaslahatan umat Islam harus dilaksanakan dalam rangka memelihara agamanya dengan baik.
Hifdz Nafs 5		1	Pelaksanaan alokasi anggaran untuk realisasi keuangan harus dapat menjaga diri sendiri dan orang lain, karena jiwa manusia harus selalu dihormati.
Hifdz Aql 3		3	Alokasi dana untuk realisasi keuangan harus dapat menjaga akal sehat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga realisasi keuangan dapat digunakan untuk mencari ilmu dan pengetahuan untuk memperoleh wawasan yang cukup dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Hifdz Nasl 1		5	Pelaksanaan alokasi realisasi keuangan untuk kemaslahatan mumematellsihlaamra hkaerturudnaapnayat ang jelas dan juga melindungi ibunya.
Hifdz Maal 4		2	Alokasi realisasi keuangan harus digunakan untuk memelihara harta umat Islam melalui bisnis yang halal, sehingga harta yang diperoleh menjadi berkah dan manfaat

CONCLUSION

Kebijakan anggaran pemerintah Bangka Tengah mengikuti visi dan misi kepala pemerintahan saat ini. Dalam perspektif maqashid asy syarÿyah, realisasi keuangan APBD yang terekam dalam monitoring dan evaluasi data pemerintah di Kabupaten Bangka Tengah belum menggambarkan tingkat maqashid asy-syarÿyah. Sebagai penulis mengambil tingkatan maqashid ash syarÿyah menurut pemikiran Al-Ghazali dengan tingkatan prioritas utama adalah hifdz al-din, hifdz al-nasf, hifdz al-'aql, hifdz al-nasl, dan terakhir hifdz al-maal.

Realisasi keuangan APBD yang tercatat dalam data monitoring dan evaluasi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengutamakan hifdz al-nafs, kemudian urutan selanjutnya adalah hifdz al-maal, hifdz al-'aql, hifdz al-din, dan hifdz al-nasl pada realisasi keuangan tahun buku 2017 ke tahun anggaran. Tahun 2020. Hasil tersebut menunjukkan bahwa realisasi realisasi keuangan APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tidak sesuai atau tidak mendekati maqashid asy-syarÿyah. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah belum dapat mengikuti tatanan maqashid asy-syarÿyah yang sesuai dengan pemikiran Al-Ghazali karena Undang-Undang Urusan Pemerintahan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur urusan pemerintahan yang bersifat wajib. dan ada. Secara opsional, ada juga beberapa perangkat daerah yang sudah memiliki persentase keuangan dan tidak dapat diganggu seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Realisasi keuangan maqashid ash-syarÿyah model baru yang penulis berikan disusun berdasarkan tatanan maqashid ash-syarÿyah mengikuti pemikiran Al Ghazali dan juga mengikuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang urusan pemerintahan wajib dan pilihan, sehingga model baru keuangan Realisasi yang diberikan penulis adalah seimbang antara maqashid asy-syarÿyah dan juga hukum, adil di mata agama dan negara, kemudian seimbang antara urusan dunia dan akhirat atau yang sering kita sebut Fallah.

REFERENCES

- Andi Ni'mah Sulfiani, & Ulfa. (2018). Pelaksanaan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Palopo. 2018, 31–35.
- Arif, FM, & Mustaming, M. (2020). Anggaran Pembangunan Daerah Berbasis Maqashid Al Syari'Ah: Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Palopo. *Proses Lainnya* 17–29. <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/1886>
- Ekonomi, S. (2019). MUTU BADAN PENYELENGGARA PELAYANAN ADMINISTRASI KESEHATAN (BPJS) DALAM PERSPEKTIF MAQASHID (Studi Kasus BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangka Raya) Tesis.
- Hilmi, Z., Rizki, A., Agung, M., & Ayu, A. (2019). Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Maqashid Syariah *Islamiomics (Journal of Islamic Economic Business and Finance)*, 9(1), 68–84.
- Kesumawijaya, H., Yusup, DK, Suyandi, D., Asih, VS, & Arsyad, A. (2020). Mengukur Gagasan dan Kerangka Konseptual Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Berbasis Syariah. 1–11.
- Maghfiroh, NA (2017). Efektifitas Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (E-Controlling) pada Bagian Evaluasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bontang. *Jurnal Paradigma (JP)*, 5(1), 34–44. <http://ejournals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/426/383>
- Maita, I., & Fithriansyah, R. (2015). Evaluasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (Simonep) dengan Pendekatan It Balanced Scorecard (Studi Kasus: Kantor Bappeda Kabupaten Karimun). *Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi dan Industri (STIKI) 7, November*, 73–80.
- Moh. Qudsi Fauzy, Sayyidatul Fitriyah. (2016). Perspektif Politik Anggaran Pemerintah Daerah Maqsyid Syari'ah: Kajian Analisis Sektorial Di Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2013-2015. 9-10 Muhammad Rifqi Ma'ari. (2020). Pengembangan Model Interoperabilitas Aplikasi E Government untuk Proses Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi. 6, 1–11. [https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:mju1D6zUtiAJ:scholar.google.com/+function+evaluate+rkpd+filetype:pdf&hl=id&as_sdt=0,5 Purnamawati, AM \(2019\). ... Kinerja Pemerintah Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia Berdasarkan Indeks Maqashid Syariah. Prosiding Konferensi Tahunan 226–242. http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancom...s,/article/view/237](https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:mju1D6zUtiAJ:scholar.google.com/+function+evaluate+rkpd+filetype:pdf&hl=id&as_sdt=0,5 Purnamawati, AM (2019). ... Kinerja Pemerintah Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia Berdasarkan Indeks Maqashid Syariah. Prosiding Konferensi Tahunan 226–242. http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancom...s,/article/view/237)
- Rajafi, A. (2010). QISHASH DAN MAQASHID AL-SYARIAH (Analisis Pemikiran Asy Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(2), 459–478. <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.20>
- Ramzani, P, I., Yusuf, MY, & Furqani, H. (2020). Model Pengelolaan Dana Otonomi Khusus untuk Kesejahteraan Masyarakat di Aceh (Ditinjau dari Maqashid Syariah). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1da)r,i 58–81. <https://doi.org/10.22373/jose.v1i1.627>
- Suyitno. (2015). Maqhasid As-Syariah dan Qishas: Pemikiran As-Syatibi dalam Kitab Al- Muwafaqat. Muaddib, [https://www.google.co0m5\(/u0r1l?\),73–94.2FKompilasi%2520Artikel%252051%25205.pdf&usg=AOvVaw0q8gKqa_jmW_r1W PiVTsaC](https://www.google.co0m5(/u0r1l?),73–94.2FKompilasi%2520Artikel%252051%25205.pdf&usg=AOvVaw0q8gKqa_jmW_r1W PiVTsaC)
- Taufeni, T., & Government, I. (2013). Peran Pemantauan dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 199–212. *Pemikiran, J., & Islam, PP (2018). AHSANA MEDIA*. 4(2).
- Ummah, Q. (2015). Institut Agama Islam Negeri Jember, Fakultas Syariah, Agustus 2015. Tesis, 2014.
- Zainuddin, Y., Zain, MY, & Syarifuddin, MN (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kapasitas Fiskal terhadap Kapasitas Pendidikan (Review Maqashid Syariah). *Ijisrt.Com*, 4(10), 465–469. <https://ijisrt.com/assets/upload/files/IJISRT19OCT1968.pdf.pdf>